

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan daerah telah membawa kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sedangkan kemajuan daerah juga menjadi kunci kemajuan bangsa karena daya saing daerah yang pada akhirnya akan menjadi sumber peningkatan daya saing bangsa menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Bappenas, 2014).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembangunan adalah usaha mengubah keadaan masyarakat tertentu menjadi keadaan masyarakat yang lebih baik dan yang dicita-citakan.

Kemajuan pembangunan di Indonesia untuk wilayah Jawa-Bali dan Sumatera relatif lebih cepat dibanding wilayah lainnya. Masyarakat di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan terutama masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, daerah pedalaman, daerah tertinggal dan pulau terdepan masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat (Bappenas, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih belum optimum dalam pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, terutama pengelolaan sumber daya agraris dan maritim sebagai basis ekonomi wilayah dan dasar keunggulan daya saing nasional. Pemecahan berbagai masalah di daerah tersebut memerlukan suatu kebijakan. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mempersempit disparitas antar daerah dengan menerapkan kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Kebijakan tersebut diharapkan terjadi keseimbangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita antar wilayah sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit gap antara perkembangan ekonomi daerah jawa dan luar jawa, dan antar Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Kuncoro, 2002).

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi diluar wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Berarti Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang kemajuan pembangunannya masih relatif lambat sehingga dengan begitu untuk pemecahan masalah ini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu menerapkan kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah sehingga Provinsi Kalimantan Barat mampu memperbaiki dan meningkatkan kemajuan pembangunannya.

Berdasarkan nilai rata-rata PDRB Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Kontan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2013 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki nilai rata-rata terbesar berarti sektor tersebut penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian dari sektor pertanian tersebut, sub sektor perkebunan yang memiliki nilai rata-rata terbesar kedua setelah sub sektor tanaman bahan makanan. Artinya, sub sektor perkebunan memiliki peran penting dalam perekonomian daerah dan dapat dijadikan salah satu potensi yang dimiliki daerah Provinsi Kalimantan Barat (lihat lampiran 2), sehingga perkebunan perlu dilakukan pengembangan sebagai konsep kawasan andalan untuk pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu cara pengembangan sub sektor perkebunan yaitu dengan dilakukannya kebijakan pengembangan tanaman perkebunan yang disusun berdasarkan pada perencanaan strategis sehingga untuk mempermudah pemerintah setempat dalam hal tersebut peneliti tertarik untuk mengidentifikasi pertumbuhan dari masing-masing komoditi sub sektor perkebunan di setiap kabupaten wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian dilakukan pengklasifikasian pertumbuhan agar strategi pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk sub sektor perkebunan dapat diarahkan dengan baik sehingga peningkatan pertumbuhannya di setiap kabupaten dapat merata.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Komoditas perkebunan apa yang menjadi komoditas basis atau komoditas non basis di wilayah Provinsi Kalimantan Barat ?
2. Bagaimana perubahan pertumbuhan produksi komoditas sub sektor perkebunan pada masing-masing kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat ?
3. Bagaimana klasifikasi pertumbuhan sub sektor perkebunan wilayah Provinsi Kalimantan Barat ?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada seluruh komoditas sub sektor perkebunan pada tiga belas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. Jenis Penelitian dan Metode Analisis

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kategori aplikasi dengan metode analisis yang akan digunakan adalah *Location Quation (LQ)* dan *Shift Share*.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui komoditi perkebunan apa yang menjadi komoditas basis atau komoditas non basis di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Mengetahui perubahan pertumbuhan produksi komoditas sub sektor perkebunan pada masing-masing kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Mengetahui klasifikasi pertumbuhan sub sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini sekaligus menambah pengetahuan mengenai kondisi pertumbuhan sub sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memudahkan pemerintah setempat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Barat sehingga mampu mempertahankan, serta meningkatkan peranan sub sektor perkebunan dalam perekonomian wilayah.
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengembangan sub sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

